

BAB I

PENDAHULUAN

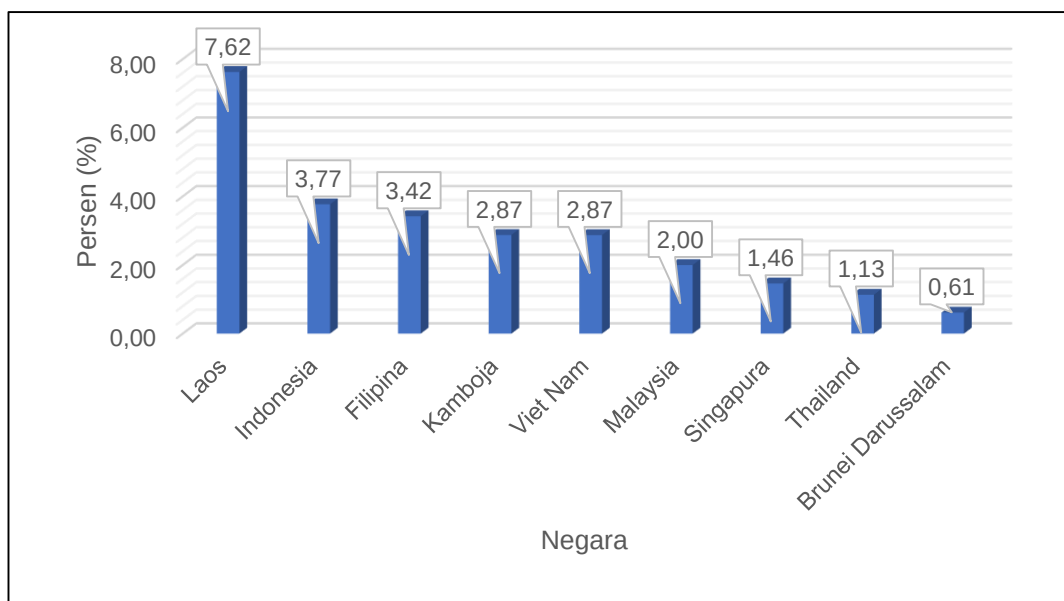
1.1. Latar Belakang

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian. Stabilitas inflasi menjadi tujuan utama kebijakan moneter karena fluktuasi harga yang tidak terkendali dapat mengganggu daya beli masyarakat, menghambat investasi, dan menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi (Zhang & Zhou, 2025).

Inflasi yang tidak terkendali memiliki dampak yang luas terhadap stabilitas ekonomi makro. Ketika inflasi bergerak di luar kendali, bukan hanya harga barang konsumsi yang terpengaruh, tetapi juga struktur biaya produksi, daya saing ekspor, dan kestabilan nilai tukar (Mohamed et al., 2025). Kondisi ini menciptakan lingkungan ekonomi yang penuh ketidakpastian, di mana para pelaku usaha kesulitan dalam merencanakan investasi jangka panjang dan masyarakat menghadapi penurunan daya beli secara nyata. Menurut Zhang & Zhou (2025), inflasi yang tinggi dapat merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan, memicu lonjakan harga aset, dan pada akhirnya memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi. Londono, et al., (2023) juga menunjukkan bahwa ketidakpastian inflasi global meningkat tajam pasca krisis keuangan global dan tetap tinggi selama pandemi COVID-19, mencerminkan tantangan baru bagi pembuat kebijakan dalam menjaga stabilitas harga. Oleh sebab itu, ketidakpastian inflasi perlu di analisis lebih lanjut.

Indonesia menjadi salah satu negara yang terus berusaha untuk menjaga stabilitas inflasi. Indonesia sebagai negara berkembang dengan ekonomi yang dinamis, sering menghadapi tantangan inflasi yang memerlukan pengelolaan yang

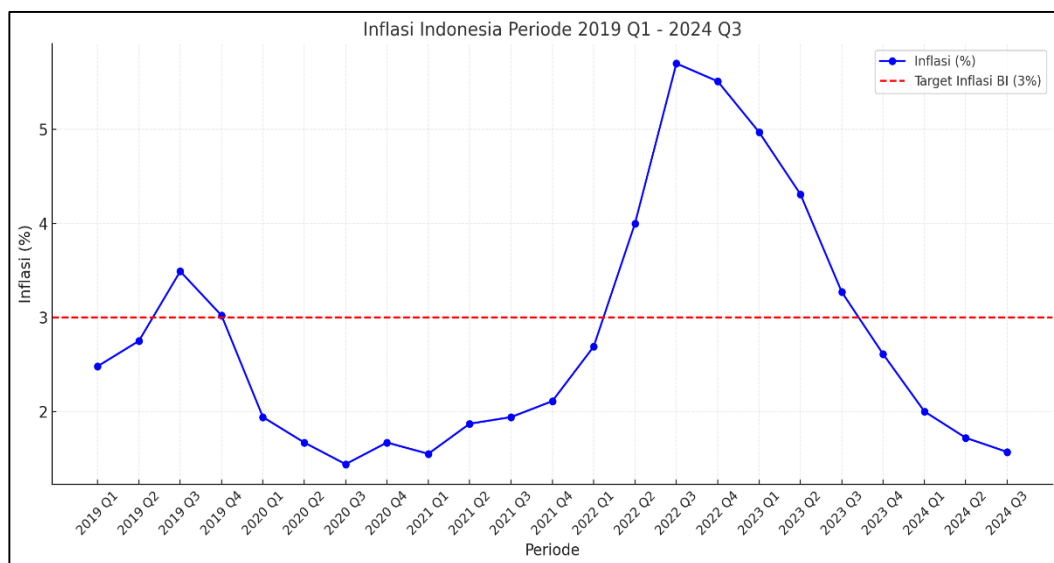
hati-hati oleh pemerintah dan otoritas moneter (Yahya & Pamuncak, 2023). Masalah inflasi di Indonesia disebabkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi permintaan misalnya peningkatan konsumsi masyarakat, terutama selama musim tertentu seperti Ramadan dan Lebaran, sering kali mendorong harga barang dan jasa naik (Ridwan, 2022). Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif, seperti peningkatan belanja pemerintah atau pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Indonesia juga mendorong inflasi Indonesia. Sisi penawaran misalnya kenaikan harga bahan baku impor akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan peningkatan biaya produksi, termasuk upah tenaga kerja dan harga energi (Amhimmid *et al.*, 2021). Oleh sebab itu, inflasi di Indonesia merupakan fenomena yang memerlukan perhatian dan pengelolaan yang cermat oleh pemerintah dan otoritas moneter.



Sumber: World Bank, 2023

Gambar 1. 1 Perbandingan Inflasi Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN Tahun 2014-2023

Gambar 1.1. menunjukkan perbandingan inflasi di Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Tujuan membandingkan inflasi untuk memberikan gambaran tentang bagaimana daya beli Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Indonesia memiliki rata-rata sebesar 3,77 persen, meskipun dikisaran 3 persen, namun posisi Indonesia tertinggi kedua setelah Laos. Hal ini memberikan arti bahwa kondisi inflasi Indonesia masih perlu perhatian serius. Inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga bahan bakar, pangan, dan nilai tukar rupiah. Indonesia, dengan ekonomi yang besar dan beragam, menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam pengelolaan inflasi (World Bank, 2023).



Sumber: Bank Indonesia, 2024

Gambar 1. 2 Inflasi Indonesia Tahun 2019-2024

Gambar 1.2. menunjukkan inflasi Indonesia menggunakan garis tren meningkat. Hal ini memberikan arti bahwa inflasi di Indonesia memiliki arah kenaikan dalam suatu rangkaian data dari waktu ke waktu atau cenderung naik seiring berjalannya waktu. Garis merah horizontal ditingkat 3% menunjukkan

target inflasi Bank Indonesia. Inflasi sempat berada di atas target pada 2022, tetapi kembali mendekati atau di bawah target pada 2023 dan 2024.

Gambar 1.2. juga menunjukkan bahwa periode 2019, inflasi Indonesia berkisar antara 2,48% hingga 3,49%, mencerminkan stabilitas ekonomi sebelum pandemi. Periode 2020, inflasi turun signifikan, dengan nilai terendah sekitar 1,44% pada Q3, akibat penurunan permintaan selama pandemi COVID-19. Periode 2021-2022 inflasi Indonesia meningkat (Bank Indonesia, 2021). Inflasi melonjak tajam pada Q2-Q4 2022, mencapai puncaknya pada 5,7% pada Q3, dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan dan gangguan rantai pasokan global, kemudian periode 2023 inflasi mengalami penurunan. Pada tahun 2024, inflasi diperkirakan terus menurun ke tingkat yang sangat rendah, sekitar 1,57% pada Q3, mencerminkan stabilitas harga.

Ketidakpastian inflasi ditunjukkan oleh pergerakan inflasi yang fluktuatif dan sulit diprediksi secara konsisten dari waktu ke waktu. Ketidakpastian ini menjadi salah satu tantangan utama dalam perekonomian Indonesia karena dapat memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi di tingkat rumah tangga, pelaku usaha, hingga pembuat kebijakan (Kostyshyna & Petersen, 2024). Indikator utama ketidakpastian inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mengukur perubahan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. IHK yang tidak stabil atau fluktuatif dapat mengindikasikan adanya ketidakpastian dalam tingkat inflasi. Selain IHK, ada beberapa indikator lain yang dapat memberikan gambaran tentang ketidakpastian inflasi, seperti ekspektasi inflasi dan tingkat inflasi itu sendiri. Ekspektasi inflasi adalah perkiraan atau proyeksi tingkat inflasi di masa depan. Jika ekspektasi inflasi tinggi dan tidak stabil, ini dapat menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian. Tingkat inflasi yang tinggi dan fluktuatif juga dapat

menciptakan ketidakpastian. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi. Di Indonesia, ketidakpastian inflasi sering kali dipicu oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global, pergerakan nilai tukar rupiah, serta dinamika kebijakan ekonomi dan politik domestik (Bank Indonesia, 2022).

Secara historis, Indonesia mengalami periode ketidakpastian inflasi yang tinggi terutama pada saat terjadi guncangan harga energi dan pangan, seperti pada 2008 dan 2013. Ketika harga minyak dunia naik secara drastis, tekanan inflasi meningkat karena Indonesia merupakan negara yang bergantung pada impor energi. Selain itu, ketergantungan pada impor bahan pangan juga membuat inflasi di Indonesia sangat sensitif terhadap perubahan harga global, sehingga menciptakan ketidakpastian yang lebih besar (World Bank, 2019).

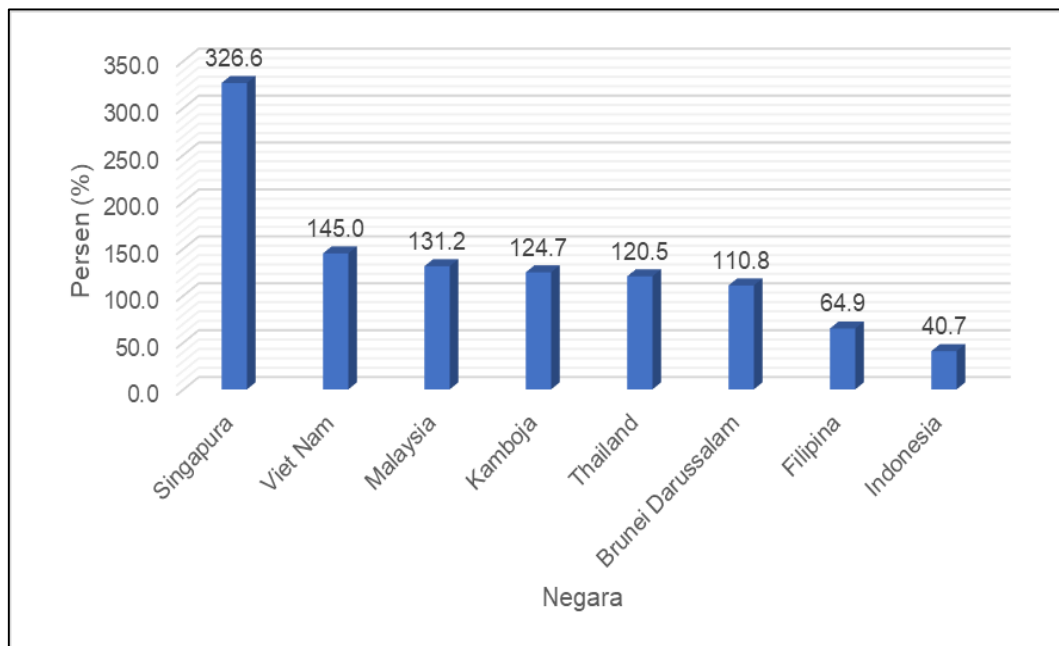
Dalam konteks kebijakan moneter, Bank Indonesia memainkan peran penting dalam mengendalikan inflasi melalui strategi *inflation targeting framework*. Namun, keberhasilan kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan ketika ekspektasi inflasi masyarakat tidak stabil. Ketidakpastian inflasi yang tinggi dapat memperburuk volatilitas suku bunga riil, yang pada akhirnya memengaruhi investasi dan konsumsi domestik (Friedman, 1977).

Dampak ketidakpastian inflasi juga terlihat dalam sektor keuangan. Volatilitas harga barang dan jasa menciptakan risiko tambahan bagi investor dan pelaku bisnis (Mandeya & Ho, 2022).. Ketidakstabilan ekspektasi inflasi sering kali menyebabkan fluktuasi nilai tukar rupiah, yang pada gilirannya memperbesar ketidakpastian dalam pasar modal dan investasi asing (Ghozali & Djaja, 2021). Dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menciptakan stabilitas makroekonomi.

Sebagai langkah mitigasi, transparansi kebijakan moneter menjadi krusial. Peningkatan kredibilitas bank sentral dan komunikasi yang efektif dengan pasar dapat membantu mengurangi ketidakpastian inflasi. Dengan demikian, meskipun ketidakpastian inflasi tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, langkah-langkah strategis yang konsisten dapat meminimalkan dampaknya terhadap perekonomian nasional (Bank Indonesia, 2022).

Indonesia sebagai negara berkembang telah sejak lama melaksanakan perekonomian terbuka (*open economy*) walaupun masih dalam skala ekonomi terbuka kecil (*small open economy*). Keterbukaan ekonomi Indonesia ditunjukkan dengan keterbukaan perdagangan seperti hilangnya hambatan dalam melakukan perdagangan, baik berupa tarif maupun non-tarif antarnegara (Novitasari *et al.*, 2015). Bukti Indonesia telah mendukung keterbukaan perdagangan yaitu turut serta membangun dan mengembangkan organisasi internasional dalam bidang perdagangan agar terjalinnya hubungan global.

Catatan peran aktif Indonesia dapat dilihat dari organisasi internasional seperti WTO (World Trade Organization) sejak tahun 1994, International textiles and Clothing Bureau (ITCB) tahun 1984, Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) tahun 1970, International Pepper Community (IPC) tahun 1977, Asian Pacific Coconut Community (APCC) tahun 1969, International Coffee Organization (ICO), Asean-Japan Center tahun 1981, dan ASEAN- Korea Center tahun 2008 (Kemlu, 2008).



Sumber: World Bank, 2023

Gambar 1. 3 Perbandingan Rata-Rata Keterbukaan Indonesia Tahun 2014-2023

Gambar 1.3. juga menunjukkan fenomena derajat keterbukaan perdagangan Indonesia paling rendah. Secara rata-rata derajat keterbukaan perdagangan hanya 40,7 persen per tahun. Hal ini memberikan arti bahwa perdagangan Indonesia masih perlu memperbanyak kerjasama perdagangan baik secara bilateral maupun multilateral. Perluasan pangsa pasar Indonesia diperlukan, sehingga perdagangan Indonesia mengalami peningkatan (World Bank, 2023). Kondisi tersebut juga memberikan arti bahwa meskipun Indonesia memiliki berbagai sektor ekonomi, banyak sektor masih kurang terintegrasi dengan pasar global. Selain itu, proses logistik yang kurang efisien, termasuk pelabuhan dan pengiriman barang, dapat menghambat perdagangan internasional (World Bank, 2023).

Inflasi terjadi juga dipengaruhi oleh keterbukaan perdagangan. Isu terkait dengan keterbukaan perdagangan menjadi perbincangan oleh para peneliti

ekonomi. Hal ini karena keterbukaan perdagangan memungkinkan negara untuk memfokuskan sumber daya pada produksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif, sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan (Kaukab & Anggara, 2024). Keterbukaan perdagangan juga dapat menjadi peluang untuk memperluas pasar mereka ke luar negeri, sehingga memungkinkan untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar dan mengurangi biaya produksi per unit.

Romer (1993) percaya bahwa keterbukaan perdagangan berfungsi sebagai kendala pada perilaku inflasi, sehingga para pembuat kebijakan merasa memiliki dampak yang menguntungkan, karena dapat membatasi insentif yang diberikan kepada pelaku ekonomi. Insentif dibatasi karena kondisi makroekonomi lebih stabil akibat rendahnya inflasi. Rogoff (1995) juga menunjukkan bahwa perdagangan internasional suatu negara menjadi lebih terbuka, maka negara tersebut cenderung memiliki lebih sedikit inflasi, karena memperoleh *less surprise from inflation*. Keterbukaan perdagangan yang semakin tinggi, maka suatu negara akan menghadapi lebih banyak guncangan merugikan yang datang dari luar. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Frankel & Cavallo (2004), yaitu keterbukaan perdagangan membuat negara-negara rentan krisis. Oleh sebab itu, dapat keterbukaan perdagangan dapat berdampak pada tingkat inflasi.

Terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh terhadap tingkat inflasi dan ketidakpastiannya. Romer (1993) mengusulkan bahwa negara-negara dengan kebijakan perdagangan yang lebih terbuka cenderung mengalami tingkat inflasi yang lebih rendah dibandingkan negara-negara yang tertutup. Penjelasan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa keterbukaan perdagangan mendorong disiplin dalam kebijakan moneter. Negara

yang terbuka akan menghadapi risiko kehilangan daya saing jika menerapkan kebijakan moneter ekspansif secara berlebihan, sehingga mendorong otoritas moneter untuk menjaga stabilitas harga. Selain itu, keterbukaan perdagangan juga memperkuat spesialisasi internasional dan efisiensi skala, yang secara teori dapat menurunkan biaya produksi dan memperlambat laju inflasi.

Keterkaitan antara ketidakpastian inflasi dan Hipotesis Romer terletak pada peran keterbukaan perdagangan dalam menciptakan ekspektasi inflasi yang lebih stabil. Semakin tinggi tingkat keterbukaan suatu negara terhadap perdagangan internasional, maka semakin rendah kecenderungan inflasi mengalami gejolak, sehingga ketidakpastian inflasi pun dapat ditekan. Romer menyimpulkan bahwa spesialisasi internasional dan efisiensi skala mampu menahan laju kenaikan harga selama biaya dapat ditekan. Oleh karena itu, semakin tinggi derajat keterbukaan perdagangan suatu negara, semakin kecil kemungkinan diterapkannya kebijakan moneter ekspansif, dan pada akhirnya negara tersebut cenderung mengalami inflasi yang lebih rendah (Demir, 2021).

Pengaruh keterbukaan perdagangan pada inflasi di Indonesia telah menjadi topik yang menarik bagi para ekonom dan pembuat kebijakan (Santoso & Kharisma, 2019). Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa perdagangan terbuka dapat memiliki efek positif dan negatif pada inflasi di Indonesia. Salah satu sumber mengatakan bahwa perdagangan terbuka dapat menyebabkan inflasi yang lebih rendah melalui peningkatan persaingan, karena memungkinkan impor barang dan jasa dengan harga lebih rendah. Sumber lain menyarankan bahwa keterbukaan perdagangan juga dapat berkontribusi pada inflasi yang lebih tinggi, terutama jika negara ini sangat bergantung pada barang impor dan mengalami fluktuasi harga komoditas global.

Selain itu, dampak keterbukaan perdagangan pada inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti rezim nilai tukar mata uang, jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah dan kredit. Konsensus umum adalah bahwa pembukaan perdagangan memiliki dampak yang signifikan pada inflasi di Indonesia. Romer (1993) mengusulkan bahwa negara-negara dengan kebijakan perdagangan terbuka mengalami inflasi yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara tertutup. Dachito & Alemu, (2017) membahas proposisi tersebut dan menyatakan bahwa perekonomian yang relatif terbuka memiliki inflasi yang lebih rendah, yang berarti bahwa kebijakan proteksionis menyebabkan tekanan inflasi dalam perekonomian. Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa pengaruh positif perdagangan terhadap inflasi juga disebutkan dalam literatur yang mendukung cost push.

Studi penelitian empiris sebagian besar tidak meyakinkan karena hasil yang beragam. Misalnya saja studi tentang Maru (2013) menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap perdagangan berdampak positif terhadap tingkat inflasi di perekonomian Afrika. Demikian pula, Zakaria (2010), Chhabra & Alam (2020) melaporkan bahwa keterbukaan perdagangan telah mempengaruhi tingkat inflasi secara positif di Pakistan dan India. Apalagi studi tentang Lin (2010) menunjukkan dampak buruk keterbukaan perdagangan terhadap tingkat inflasi. Hal serupa juga dilakukan oleh Mukhtar et al (2019) yang melakukan studi time-series terhadap perekonomian Pakistan untuk menguji hubungan antara inflasi dan keterbukaan perdagangan. Hasil penelitian mereka juga mendokumentasikan adanya hubungan positif antara keterbukaan perdagangan dan inflasi, sedangkan pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif dengan inflasi di Pakistan. Demikian pula, Sakanko & Joseph (2019) melakukan studi time series terhadap

perekonomian Nigeria untuk menguji hubungan antara inflasi dan keterbukaan perdagangan. Mereka menemukan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Demikian pula, hasil penelitian mereka juga menunjukkan pengaruh signifikan dan negatif pertumbuhan ekonomi terhadap inflasi. Dapat disimpulkan dari literatur di atas bahwa hubungan antara keterbukaan perdagangan dan inflasi tidak diselesaikan sebagai studi empiris, khususnya studi time series dilakukan untuk satu negara, hasilnya tidak meyakinkan mengenai hubungan tersebut.

Kesenjangan pada penelitian Sulehri & Khan (2020), Ceyhan et al (2022), termasuk dalam kategori *empirical gap*, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara keterbukaan perdagangan dan inflasi. Secara keseluruhan mengenai hubungan keterbukaan perdagangan dan inflasi, terdapat beberapa penelitian yang mendukung hipotesis yang merupakan penelitian paling utama dalam hal ini dan mengusulkan adanya hubungan negatif. Nasrat (2020), memberikan hubungan positif antara keterbukaan perdagangan dan inflasi. Hasil-hasil ini menimbulkan perdebatan baik secara empiris maupun teoritis, sehingga menyebabkan hubungan keterbukaan perdagangan dan inflasi tetap menjadi topik yang kontroversial.

Ketidakpastian inflasi mengacu pada keraguan atau ketidakjelasan mengenai tingkat inflasi dimasa depan. Ini bukan hanya tentang seberapa tinggi inflasi, tetapi juga seberapa sulit memprediksi atau memperkirakan dengan akurat berapa tingkat inflasi yang akan terjadi. Ketidakpastian inflasi merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian makro yang berpengaruh terhadap kebijakan moneter, investasi, dan ekspektasi publik. Dalam konteks Indonesia, volatilitas inflasi menjadi perhatian serius, terutama pasca krisis keuangan global

2008 yang mengguncang sistem keuangan dunia. Inflasi yang tidak stabil dapat mempengaruhi perilaku agen ekonomi dalam mengambil keputusan konsumsi dan investasi. Oleh karena itu, pengukuran dan pemodelan ketidakpastian inflasi menjadi relevan. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) dan GARCH (Generalized ARCH). Kedua model ini dapat menangkap dinamika volatilitas inflasi dari waktu ke waktu. Ketika inflasi tidak hanya meningkat tetapi juga tidak dapat diprediksi secara stabil, risiko dalam perekonomian meningkat. Ketidakpastian ini juga menciptakan dilema bagi pembuat kebijakan dalam menentukan arah suku bunga dan pengendalian harga.

Krisis keuangan global 2008 memberikan dampak sistemik terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia, yang menyebabkan tekanan pada sektor keuangan, nilai tukar, dan harga komoditas. Dalam konteks ini, muncul hipotesis Romer yang menyatakan bahwa ketidakpastian inflasi meningkat setelah krisis keuangan global. Hipotesis ini menekankan bahwa krisis memicu ekspektasi inflasi yang tidak menentu karena kebijakan stimulus besar-besaran, pelonggaran kuantitatif, dan pergeseran paradigma kebijakan moneter. Dalam kerangka ini, ketidakpastian inflasi bukan hanya fenomena teknis, tetapi juga mencerminkan persepsi dan ketakutan pelaku pasar terhadap masa depan ekonomi. Studi oleh Romer (1993) mencatat bahwa inflasi setelah krisis menjadi lebih tidak dapat diprediksi, meskipun inflasi aktual mungkin tetap rendah. Hal ini menimbulkan dilema bagi bank sentral dalam mengelola ekspektasi pasar. Untuk Indonesia, penting menilai apakah pola serupa terjadi di dalam negeri, mengingat ketergantungan terhadap perdagangan global dan arus modal asing.

Ketidakpastian inflasi juga berdampak pada kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Bila ketidakpastian tinggi, Bank Indonesia mungkin lebih berhati-hati dalam menaikkan atau menurunkan suku bunga karena takut memicu instabilitas. Dalam kondisi ini, fungsi reaksi kebijakan moneter dapat menjadi asimetris. Misalnya, BI mungkin menunda pelonggaran moneter karena ketakutan akan inflasi yang lebih tinggi dari ekspektasi. Ini sejalan dengan argumen dalam teori "inflation uncertainty and output growth trade-off" oleh Friedman (1977), di mana ketidakpastian inflasi bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Studi oleh Cukierman dan Meltzer (1986) juga menyatakan bahwa bank sentral dapat mengeksploitasi ketidakpastian inflasi untuk menciptakan ruang gerak kebijakan. Di Indonesia, dinamika semacam ini harus diteliti dengan hati-hati, terutama sejak diberlakukannya rezim inflation targeting tahun 2005. Apakah kebijakan ini cukup efektif dalam menstabilkan ekspektasi inflasi pasca krisis global?

Hasil empiris dari model ARCH-GARCH menunjukkan bahwa variabel shock inflasi masa lalu memiliki dampak signifikan terhadap volatilitas saat ini di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa ekspektasi inflasi sangat tergantung pada kejadian-kejadian ekonomi sebelumnya, seperti krisis moneter Asia 1998 dan krisis keuangan global 2008. Tingginya volatilitas setelah tahun-tahun krisis menunjukkan bahwa sistem perekonomian Indonesia memerlukan waktu cukup lama untuk kembali ke kondisi stabil. Penelitian oleh Azis dan Fachrudin (2016) menunjukkan bahwa krisis global 2008 telah memperbesar ketidakpastian inflasi dan memperkuat efek spillover dari pasar global ke domestik. Selain itu, hasil estimasi GARCH juga menunjukkan bahwa dampak dari shock inflasi terhadap volatilitas berlangsung cukup lama, mendukung hipotesis persistence. Fenomena

ini sejalan dengan temuan McMillan dan Speight (2010) yang menegaskan bahwa negara berkembang lebih rentan terhadap ketidakpastian inflasi dibanding negara maju. Oleh karena itu, stabilisasi ekspektasi menjadi kunci utama dalam pengelolaan inflasi jangka panjang.

Sementara itu, hasil estimasi FMOLS menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang signifikan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi tidak berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga dan dinamika pasar valuta asing. Dalam konteks ini, transmisi kebijakan moneter menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas harga. Jika Bank Indonesia tidak dapat mengelola ekspektasi melalui suku bunga, maka ketidakpastian inflasi akan terus berlanjut. Hal ini sesuai dengan argumen Mishkin (2007) bahwa kredibilitas bank sentral merupakan prasyarat utama untuk mengelola ekspektasi inflasi. Dengan demikian, reformasi institusional dalam penguatan independensi Bank Indonesia menjadi relevan dalam menghadapi volatilitas harga. Hasil ini juga menekankan pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam meredam tekanan inflasi jangka panjang.

Ketidakpastian inflasi dapat menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan tetap. Dalam konteks Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi, inflasi yang tidak stabil dapat meningkatkan beban hidup masyarakat rentan. Ketika harga-harga naik secara tak terduga, daya beli kelompok bawah akan tergerus. Fenomena ini diperkuat oleh penelitian Fields (2010) yang menyatakan bahwa ketidakstabilan harga dapat memperburuk ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian

inflasi dan pengurangan ketidakpastian harga merupakan bagian integral dari agenda pembangunan inklusif.

Selain itu, ketidakpastian inflasi dapat menghambat investasi domestik maupun asing karena pelaku usaha cenderung menunda keputusan investasi ketika risiko harga tidak dapat diprediksi. Dalam ekonomi terbuka seperti Indonesia, volatilitas harga yang tinggi menjadi faktor penghalang dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Menurut penelitian Bloom (2009), ketidakpastian ekonomi, termasuk ketidakpastian inflasi, secara signifikan menurunkan tingkat investasi dan produktivitas perusahaan. Studi oleh Arby dan Hanif (2015) juga menemukan bahwa kenaikan ketidakpastian inflasi di negara berkembang berkorelasi negatif dengan investasi sektor riil. Di Indonesia, sektor manufaktur dan UMKM sangat rentan terhadap fluktuasi harga bahan baku. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ketidakpastian inflasi akan merusak daya saing dan keberlanjutan usaha. Maka dari itu, penting bagi otoritas kebijakan untuk menyediakan sinyal inflasi yang jelas dan stabil bagi pelaku usaha. Penguatan kerangka forward guidance dapat menjadi salah satu solusi kebijakan.

Lebih lanjut, volatilitas inflasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga minyak dunia, perubahan nilai tukar dolar AS, dan kondisi geopolitik global. Sebagai negara yang masih tergantung pada impor energi dan bahan pangan, gejolak harga internasional mudah ditransmisikan ke dalam negeri. Model ARCH-GARCH yang digunakan dalam studi ini mampu menangkap efek volatilitas global tersebut terhadap ketidakpastian inflasi domestik. Studi oleh Ghosh et al. (2012) menyatakan bahwa fluktuasi harga minyak global secara signifikan memicu peningkatan volatilitas inflasi di negara berkembang. Di Indonesia, penghapusan subsidi energi pada tahun 2015 meningkatkan

sensitivitas harga domestik terhadap pergerakan pasar global. Oleh karena itu, stabilisasi harga energi melalui cadangan strategis nasional dan diversifikasi sumber energi menjadi penting. Ketahanan pangan juga harus diperkuat untuk mengurangi dampak volatilitas eksternal terhadap inflasi domestik.

Selama dua dekade terakhir, kebijakan moneter Indonesia mengalami berbagai perubahan mulai dari pengendalian suku bunga hingga sistem inflation targeting. Namun, efektivitas kebijakan ini dalam mengurangi ketidakpastian inflasi masih diperdebatkan. Hasil riset ini menunjukkan bahwa meskipun inflasi tahunan dapat dikendalikan dalam kisaran target, namun volatilitas inflasi tetap tinggi terutama dalam periode krisis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara inflasi aktual dan inflasi yang dipersepsikan atau diantisipasi oleh masyarakat. Menurut Clarida et al. (2000), efektivitas rezim inflation targeting sangat tergantung pada kredibilitas dan komunikasi kebijakan moneter. Di Indonesia, meskipun komunikasi Bank Indonesia meningkat, publik masih meragukan kapasitasnya dalam mengendalikan inflasi yang dipicu oleh faktor non-moneter seperti cuaca, distribusi, dan harga pangan. Oleh karena itu, strategi stabilisasi harga harus mencakup dimensi struktural dan sektor riil.

Temuan penting dari studi ini nantinya bahwa periode pasca krisis keuangan global menunjukkan peningkatan ketidakpastian inflasi di Indonesia, yang ditandai dengan peningkatan varians bersyarat pada model GARCH dan perubahan hubungan jangka panjang antar variabel makro. Hipotesis Romer yang menyatakan bahwa krisis global menyebabkan perubahan struktural dalam ekspektasi inflasi terbukti relevan. Ketidakpastian ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan gangguan psikologis dan institusional dalam sistem ekonomi. Sejalan dengan temuan Ranjan dan Ghosh (2012), krisis global

mendorong negara-negara berkembang menghadapi tekanan inflasi yang tidak biasa, yang tidak dapat dijelaskan hanya oleh teori moneteris konvensional. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan baru yang lebih komprehensif dalam pengelolaan inflasi di era ketidakpastian global.

Dalam praktiknya, hasil penelitian ini juga penting bagi investor dan pelaku pasar keuangan. Ketidakpastian inflasi mempengaruhi penetapan premi risiko, suku bunga, dan strategi portofolio investasi. Dengan memahami dinamika volatilitas inflasi, pelaku pasar dapat menyusun strategi lindung nilai (hedging) yang lebih baik. Misalnya, saat volatilitas inflasi meningkat, investor mungkin beralih ke aset lindung seperti emas atau properti. Dalam konteks ini, model GARCH dapat digunakan sebagai alat prediktif untuk menentukan risiko pasar yang berkaitan dengan inflasi. Penelitian oleh Engle (2001) menekankan bahwa model GARCH adalah alat penting dalam manajemen risiko di pasar keuangan. Oleh karena itu, riset ini membuka peluang integrasi model makroekonomi dan keuangan untuk mendukung keputusan investasi yang lebih rasional.

Pembaruan pada penelitian ini yaitu mencoba untuk menggunakan periode lebih baru dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya. Selain itu, studi ini juga mencoba ketidakpastian inflasi dengan bulanan. Disisi lain, studi ini juga menambahkan variabel kontrol seperti nilai tukar, jumlah uang beredar, harga saham LQ45, pengeluaran pemerintah dan kredit. Dengan alat analisis yang digunakan ialah ARCH-GARCH, yaitu model time series yang digunakan untuk mengukur volatilitas atau ketidakpastian inflasi dari waktu ke waktu, guna menjawab rumusan masalah pertama. Sementara itu, digunakan juga FMOLS, yaitu metode regresi lanjutan yang digunakan untuk mengestimasi hubungan jangka panjang (kointegrasi) antara keterbukaan perdagangan dan inflasi, guna

menjawab rumusan masalah kedua, dengan menggunakan data time series berupa kuartalan dari tahun 2010-2024.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengungkapkan keterbukaan perdagangan terhadap inflasi di berbagai negara. Namun, hasil tidak selalu sejalan atau tidak konsisten. Berdasarkan fenomena di atas, penelitian tertarik untuk meneliti secara empiris **“Ketidakpastian Inflasi dan Pembuktian Hipotesis Romer Pasca Krisis Keuangan Global”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam studi ini sebagai berikut:

1. Apakah Indonesia mengalami ketidakpastian inflasi pasca krisis keuangan global?
2. Apakah hipotesis romer dapat dibuktikan di Indonesia pasca krisis keuangan global ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam studi ini sebagai berikut:

1. Menguji dan mengidentifikasi ketidakpastian inflasi pasca krisis keuangan global.
2. Untuk menganalisis hipotesis romer dapat dibuktikan di Indonesia pasca krisis keuangan global.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam studi ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis, yaitu diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran, referensi, literatur dan tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis selanjutnya. Selain itu, diharapkan dapat mendukung hasil penelitian yang terdahulu dengan tema yang sama yaitu ketidakpastian inflasi dan hipotesis romer.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis yaitu, studi ini diharapkan dapat menambah wawasan penelitian dan bisa digunakan sebagai wahana untuk mengkaji secara ilmiah tentang ketidakpastian inflasi dan hipotesis romer. Dan studi ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menetapkan kebijakan terkait.